

FAKTOR NON FINANCIAL DAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING DISCLOSURE PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Eka Widiastuti dan M. Asmeldi Firman

*Program Studi Akuntansi Syariah
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI
Email: masmeldif@gmail.com*

ABSTRACT

The study aims to investigate the Islamic Social Reporting Disclosure (ISRD) practices in Sharia Banks of Indonesia and determine the non financial factors that may influence to level of ISRD on 2010 – 2012. The samples in this study are 30 annual reports of sharia banks for three years. Level of ISRD is measured by ISR index that have six categories including investment and finance, corporate governance, product and services, employee, society, and environment. This study identified three non financial factors that influence to level of ISRD such as Media Exposure, main institutional ownership, and Islamic governance score (IG-score). Average ISR disclosure for three years had reached 55%. The test result by multiple linear regression test showed that only Media Exposure and IG-score have a significant to level of ISRD positively. On the other side, main institutional ownership doesn't have a significant to level of ISRD. In addition, this study found profitability as control variable doesn't have a significant to level ISRD too.

Keywords: *ISRD, Media Exposure, Main Institutional Ownership, and IG-score.*

1. PENDAHULUAN

Isu *Corporate Social Responsibility* (CSR) sedang hangat diperbincangkan bersama dengan revolusi industri dunia yang kian berkembang. Di Indonesia, pelaksanaan CSR telah memiliki dukungan pemerintah dengan adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai payung hukum. Setelah Undang-Undang di atas disahkan, maka pelaksanaan CSR yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) (Fauziah dan Prabowo, 2013, hlm. 2). Seiring dengan adanya *trend* pengungkapan CSR, industri perbankan turut serta ambil bagian mengungkapkan aspek sosialnya dalam *annual report* meskipun dalam bentuk sederhana (Agrytasari, 2012, hlm 5). Tentunya pengungkapan CSR tidak hanya dilaksanakan oleh bank konvensional. Namun bank syariah juga turut serta dalam melaksanakan CSR di Indonesia.

Bank syariah memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional karena nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil'alam* di dalamnya membuat bank syariah memiliki "*wajah sosial*" (Ahmed, 2012, hlm 1) Praktek CSR di perbankan syariah memiliki tujuan untuk mewujudkan

maqosid syariah (tujuan syariah) dan menjaga *maslahah* bagi umat sebagai bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT (Dusuki dan Abdullah, 2007, hlm. 33). Berdasarkan perbedaan di atas maka pengukuran kinerja sosial bank syariah membutuhkan pengukuran yang tersendiri. *Islamic Social Reporting Index* (selanjutnya disebut indeks ISR) tengah hangat diperbincangkan sebagai solusi pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial entitas syariah. Konsep indeks ISR ini pertama kali diperkenalkan oleh Haniffa (2002) yang selanjutnya dikembangkan oleh Othman dan Thani (2009).

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pengungkapan CSR di bank syariah relatif rendah. Penelitian Maali, *et al.* (2003) menggunakan sampel 29 bank syariah di negara-negara muslim. Namun hasilnya menunjukkan bahwa hanya sebelas bank (38%) yang mengungkapkan pertanggung jawaban sosialnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh AAOIFI. Penelitian Zubairu *et al.* (2012) mengenai bank syariah di Saudi Arabia menyimpulkan bank syariah di Saudi Arabia lebih banyak meniru bank konvensional tidak seluruhnya berbasis pada ketentuan syariah. Penelitian Rizkiningsih (2012) menunjukkan pengungkapan indeks ISR bank syariah Uni Emirat Arab mendapat peringkat terendah antara Indonesia, Malaysia, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia dan Kuwait. Di negara tetangga Malaysia, Othman dan Thani (2010) menyimpulkan ISR di perusahaan *go public* Malaysia masih rendah.

Sedangkan di Indonesia sendiri, beberapa penelitian mengenai pengungkapan ISR di bank syariah juga mengalami hal yang sama. Penelitian Sofyani *et al.* (2012) melakukan studi komparasi indeks ISR bank syariah Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitiannya menyimpulkan indeks ISR Malaysia lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Kendati keduanya juga tidak dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik. Penelitian Raharja (2011) menyimpulkan bank syariah di Indonesia memiliki tingkat pengungkapan ISR yang rendah pada tahun 2009. Senada dengan penelitian Darus *et al.* (2013) melakukan penelitian mengenai indeks ISR bank syariah di Indonesia periode 2007-2011 menyimpulkan hanya ada 2 bank yang secara konsisten menyajikan pengungkapan CSR-nya dalam *annual report*.

Problematis rendahnya pengungkapan ISR di negara-negara muslim, baik di negara maju maupun berkembang telah menjadi masalah secara global tidak terkecuali bagi Indonesia. Rendahnya tingkat pengungkapan ISR bank syariah disebabkan oleh beberapa faktor-faktor baik dari segi *financial* maupun *non financial*. Faktor-faktor financial yang terbukti secara empiris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR diantaranya *size* perusahaan dan profitabilitas (Alawi dan Rahman, 2011; Al-Shubiri *et al.*, 2012; Liew, *et al.*, 2012; Yuliani, 2012; Widiawati dan Raharja, 2012; Othman *et al.*, 2009; Lucyanda dan Siagian, 2012).

Sedangkan, faktor *non financial* yang dindikasi berpengaruh signifikan dari sisi komunikasi salah satunya adalah *Media Exposure*. Dunia maya sebagai *media exposure* perusahaan untuk berkomunikasi dengan stakeholder memang efektif di era globalisasi saat ini, selain *annual report* tentunya (Kristi, 2012, hlm. 21). Kemudian, faktor lain yang menjadi sorotan

berbeda mewakili sisi kepemilikan institusional induk. Kepemilikan institusional induk menjadi faktor yang menarik karena 10 BUS yang ada di Indonesia merupakan bentukan dari bank konvensional yang menjadi induk mereka, hanya Bank Muamalat yang dimiliki oleh bank asing yaitu *Islamic Development Bank* (IDB). Tentunya, BUS yang memiliki status anak perusahaan dari bank yang sudah terlebih dahulu lahir setidaknya dapat mengambil pengalaman dan bekal dari induknya (dalam hal ini pengungkapan CSR) (Agrytasari, 2012, hlm. 82). Sedangkan, Nurkhin (2010) dan Rustiarini (2010) menyatakan hal yang bertolak belakang.

Pada entitas syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi sebagai pengawas aktivitas dan kegiatan bank syariah agar senantiasa terhindar dari hal-hal yang haram (Agrytasari, 2012, hlm. 10). Dewan Pengawas Syariah memegang peran penting untuk memberikan *sharia assurance* kepada para *stakeholder* bank syariah, tidak terkecuali dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah. Sehingga DPS dapat menjadi cermin tata kelola perusahaan secara Islami (*Islamic Governance*). *Islamic Governance Score* dinilai berdasarkan beberapa *point* terkait karakteristik ideal sebuah DPS. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan DPS dan *IG-score* memiliki hasil beragam. Farook dan Lanis (2007), Sudaryati dan Eskadewi (2012), dan Chariri (2012) mengemukakan bahwa *IG-score* yang diukur dengan DPS berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah entitas syariah. Sedangkan Agrytasari (2012), Rizkiningsih (2012), dan Hardiyanti (2012) berpendapat sebaliknya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menunjukkan rendahnya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah di Indonesia dan negara-negara muslim dunia. Kemudian didukung dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR dari penelitian di atas yang menunjukkan hasil tidak konsisten. Maka penelitian ini akan menguji kembali faktor – faktor yang mempengaruhi ISRD dari sudut pandang berbeda yaitu sisi *non financial*. Variabel yang mewakili adalah *Media Exposure*, kepemilikan institusional induk, dan *IG-score* bank syariah. Dengan demikian, faktor-faktor yang berhasil ditemukan berpengaruh signifikan dapat melengkapi amunisi baru dalam meningkatkan *Islamic Social Reporting Disclosure* bank syariah di Indonesia.

2. KAJIAN TEORI

2.1 ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEX (ISR)

Menurut Gray, et al (1987) dalam Haniffa (2002) menerangkan hubungan pengungkapan dalam laporan keuangan dengan tanggung jawab sosial sebagai berikut:

...the process of communicating the social and environmental effects of organization is economic actions to particular interest groups within society and to society at large. As such, it involves extending the

accountability of organisations (particularly companies), beyond the traditional role of providing a financial account to owners of capital, in particular, shareholder. Such an extension is predicated upon the assumption that companies do have wider responsibilities than simply to make money for their shareholders.

Berdasarkan pernyataan di atas, Gray, et al. (1987) menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan merupakan proses komunikasi antara perusahaan dengan lingkungan masyarakat secara luas. Melalui perluasan tersebut, menjadikan asumsi bahwa perusahaan harus melakukan tanggung jawab secara luas dibandingkan hanya mencetak uang bagi *shareholder*.

Islamic social reporting adalah jawaban atas kebutuhan pengukuran tanggung jawab perusahaan yang berlandaskan syariat Islam. Dampak dari nilai dan filosofi Islam yang berbeda jauh dengan konsep CSR klasik, menjadikan perbedaan pula dalam praktik pengungkapan tanggung jawab sosial. *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang tidak hanya berupa keinginan besar dari seluruh masyarakat terhadap peranan perusahaan dalam ekonomi melainkan berkaitan dengan perspektif spiritual (Haniffa, 2002). Penelitian ini menggunakan kerangka *Islamic Social Reporting* dengan rujukan utama Haniffa (2002) yang dimodifikasi dengan item-item yang terdapat pada penelitian Othman dan Thani (2010) dan Rizkiningsih (2012).

2.2 MEDIA EXPOSURE DAN ISRD

Perusahaan bisa mengungkapkan aktivitas *CSR* melalui berbagai media tidak hanya melalui *annual report*. Kristi (2012) menyatakan bahwa media internet (*website*) merupakan media yang efektif dengan didukung oleh para pemakai internet yang mulai meningkat. Dengan mengkomunikasikan *CSR* melalui media internet, diharapkan masyarakat mengetahui aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudahan informasi yang didapatkan oleh *stakeholder* melalui *Media Exposure*, akan menimbulkan konsekuensi manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial lebih baik lagi di dalam laporan tahunannya. (Reverte, 2009; Yao et., al., 2011; dan Kristi, 2012). Berdasarkan teori yang menggambarkan hubungan *Media Exposure* dan ISRD, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H0_a: *Media Exposure* tidak signifikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat ISRD.

H1_a: *Media Exposure* signifikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat ISRD.

2.3 KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL INDUK DAN ISRD

Kepemilikan institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Novita dan Djakman, 2008, dalam Nurkhin, hlm. 40). Contoh kontrol yang dapat diberikan adalah memberikan arahan dan masukan kepada manajemen ketika manajemen tidak melakukan aktivitas

positif seperti pengungkapan CSR untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Dengan demikian pengungkapan tanggung jawab social perusahaan dapat dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan institusional. Dalam penelitian ini mencoba untuk membuktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara pengungkapan ISRD BUS dengan legitimasi bank induknya yang terlebih dahulu lahir dan memiliki pengalaman matang khususnya dalam penyampaian *annual report*. Maka hipotesis kedua yang diajukan sebagai berikut.

$H0_b$: Kepemilikan Institusional Induk tidak signifikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat ISRD.

$H1_b$: Kepemilikan Institusional Induk signifikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat ISRD.

2.4 ISLAMIC GOVERNANCE SCORE (IG-SCORE) DAN ISRD

IG-score menjadi corak khusus bagi bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Tata kelola bank yang berlandaskan akan syariat Islam, tentunya memiliki batasan – batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Keberadaan DPS sebagai auditor *sharia compliance* (termasuk praktik akuntansi), banyak dijadikan representasi dari *Islamic governance* dalam penelitian terdahulu, diantaranya Farook dan Lanis (2007), Rizkiningsih (2012), Sudaryati dan Eskadewi (2012), Hardiyanti (2012), dan Chariri (2012).

Idealnya, seorang DPS harus memiliki pemahaman yang cukup tentang syariah dan isu mengenai ekonomi, karena beberapa kasus yang ada di bank syariah mengalami *overlapping* satu sama lain. (Bakar, 2002, dalam Farook dan Lanis, 2007 hlm. 229). Karim (1999) dalam Farook dan Lanis (2007) menambahkan DPS haruslah lebih mumpuni dalam kedua hal tersebut dibandingkan manajemen untuk menghindari adanya pelanggaran syariah. Hal itu dapat mengurangi mandat mengenai CSR termasuk pengungkapannya

$H0_c$: *IG-score* tidak signifikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat ISRD.

$H1_c$: *IG-score* positif signifikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat ISRD.

Adapun, secara simultan ketiga faktor *non financial* tersebut diduga pula memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat ISRD bank syariah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan untuk keseluruhan faktor *non financial* adalah:

$H0_d$: *Media Exposure*, Kepemilikan Institusional Induk, dan *IG-score* tidak signifikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat ISRD.

$H1_d$: *Media Exposure*, Kepemilikan Institusional Induk, dan *IG-score* signifikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat ISRD.

3. METODE PENELITIAN

3.1 VARIABEL TERIKAT (DEPENDEN)

3.1.1 Islamic Social Reporting Disclosure (ISRD)

ISRD sebagai variabel dependen diproksikan dengan *Islamic Social Reporting Index* berdasarkan 50 item pengungkapan tanggung jawab sosial Islami yang dimodifikasi dalam penelitian Othman, et al (2009) dan Rizkiningsih (2012). Metode yang digunakan dalam pengukuran ISRD bank syariah adalah *content analysis*. (Ekomadyo, 2006 dalam Mas'ud, 2013, hlm. 7). Kodifikasi indeks ISR dibagi menjadi 6 tema besar yaitu investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, lingkungan, dan tata kelola organisasi. Kemudian tahap penilaian menggunakan ketentuan nilai 1 jika ada pengungkapan terkait item tersebut dan 0 untuk sebaliknya. Selanjutnya, pengukuran variabel dependen ini dengan menggunakan total seluruh item yang berhasil diungkapkan oleh bank syariah.

3.2 VARIABEL INDEPENDEN

3.2.1 Media Exposure

Variabel *Media Exposure* diukur menggunakan frekuensi banyaknya jumlah *press release* dalam *website* masing-masing bank. Penelitian ini menggunakan data *time series*, sehingga peneliti juga mencari tahu pengungkapan yang di *posting* pada tahun sebelumnya.

3.2.2 Kepemilikan Institusional Induk

Variabel Kepemilikan Institusional Induk diukur sesuai penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karina (2013) dengan rumus perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki induk dengan total saham yang diterbitkan bank syariah.

3.2.3 Islamic Governance Score (IG-score)

IG-score diproksikan karakteristik DPS yang ideal. Pengukuran *IG-score* berdasarkan ukuran DPS, latar belakang pendidikan, *cross membership*, dan reputasi DPS. Karakteristik tersebut diukur dengan *variable dummy*, yang kemudian dijumlah membentuk *IG-score*. Penggunaan karakteristik ini merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farook dan Lanis (2007), dengan tabel sebagai berikut ;

Tabel 1. Pengukuran *Islamic Governance Score*

Karakteristik DPS	Memenuhi	Tidak Memenuhi
Jumlah Anggota DPS tidak kurang dari 2 orang	1	0
Salah satu atau semua anggota DPS memiliki latar belakang pendidikan syariah, ekonomi, atau akuntansi	1	0
Memiliki anggota DPS yang bekerja di institusi keuangan syariah lain (merangkap	1	0

Karakteristik DPS	Memenuhi	Tidak Memenuhi
jabatan)		
Anggota DPS memiliki pengalaman profesi dibidang syariah dan ekonomi yang mendukung kinerjanya	1	0
<i>Islamic Governance Score</i>	Score max. 4	

Sumber : Farook dan Lanis, 2007

Dalam penelitian ini, terdapat juga dua variabel kontrol. *Size* perusahaan diproksikan dengan total asset (*log natural of total assets*) bank syariah. Kemudian profitabilitas diproksikan menggunakan rasio Return On Asset (ROA), yaitu perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki bank syariah.

3.3 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank syariah yang ada di Indonesia mulai pada tahun 2010 hingga 2012 yaitu sebanyak 11 Bank Umum syariah, 24 Unit Usaha Syariah, dan 160 BPRS (Bank Indonesia, Juli 2013). Dari populasi tersebut akan ditarik beberapa sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria bank umum syariah yang mempublikasikan *annual-report* pada tahun 2010 sampai dengan 2012. Oleh sebab itu, sampel yang diperoleh berjumlah 10 bank umum syariah diantaranya Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Mega Syariah (BMS), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Mega Syariah (BMS), Bank Panin Syariah (BPS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), Bank BCA Syariah (BCAS), Bank Syariah Bukopin (BSP), dan Bank Victoria Syariah (BVS).

3.4 METODE ANALISIS

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel ISR adalah analisis regresi linier berganda (*multiple linier regression*). Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$ISR D = \alpha + \beta 1ME + \beta 2OWN + \beta 3IG + \beta 4ROA + \beta 5SIZE + e$$

Keterangan :

ISR D = Islamic Social Reporting Index

α = Konstanta

ME = Media Exposure

OWN = Kepemilikan Institusional Induk

IG = Islamic Governance Score

ROA = Profitability

SIZE = Total Assets

$\beta 1, \beta 2, \beta 3, \beta 4, \beta 5$ = Koefisien Regresi

e = error (pengganggu)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 TINGKAT ISRD BANK SYARIAH BERDASARKAN TOTAL ITEM YANG DIUNGKAPKAN

Dalam penelitian ini pengujian ISRD bank syariah diukur berdasarkan nilai-nilai Islam yang mengerucut menjadi enam tema umum yaitu keuangan dan investasi, produk dan jasa, ketenagakerjaan, sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan yang terdiri dari 50 item pengungkapan. Berikut gambaran tingkat ISRD bank syariah selama tahun 2010-2012.

Tabel 2. Deskripsi *Islamic Social Reporting Disclosure* Bank Syariah

No	Nama Bank	Jumlah Item yang Diungkapkan			Rata-rata per Tahun	ISRD (%)
		2010	2011	2012		
1	BSM	40	40	40	40	80%
2	BMI	32	36	39	36	71%
3	BNIS	35	35	35	35	70%
4	BMS	25	27	27	26	53%
5	BCAS	25	28	27	27	53%
6	BSB	26	25	28	26	53%
7	BRIS	21	25	32	26	52%
8	BJBS	15	21	30	22	44%
9	BVS	18	18	19	18	37%
10	BPS	13	18	23	18	36%
	Total	250	273	300		
	Rata-Rata	25	27.3	30		55%

Sumber : Data per Banksekunder yang diolah, 2014

Berdasarkan persentase ISRD dalam tabel di atas, menunjukkan kesimpulan bahwa perolehan skor ISRD tertinggi umumnya dimiliki oleh BUS dengan usia yang telah matang, seperti BSM, BMI, dan BNIS. Hasil tersebut mendukung penelitian Al-Shubiri, et. al (2012) yang menyatakan bahwa usia entitas memengaruhi kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial karena adanya pengalaman lebih lama dalam beroperasi. Urutan pendirian BUS di Indonesia yang menunjukkan usia masing-masing bank dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Urutan Pendirian BUS di Indonesia

No	Nama Bank	Tanggal Berdiri	No	Nama Bank	Tanggal Berdiri
1	BMI	1 November 1991	6	BPS	6 Oktober 2009
2	BSM	25 Oktober 1999	7	BVS	10 Februari 2010
3	BMS	27 Juli 2004	8	BCAS	2 Maret 2010

4	BRIS	16 Oktober 2008	9	BJBS	30 April 2010
5	BSB	27 Oktober 2008	10	BNIS	21 Mei 2010

Sumber : Laporan Tahunan Masing-Masing BUS, 2012

Tabel 3 di atas membuktikan bahwa usia BMI dan BSM memang terbukti cukup matang, sehingga dapat menempati peringkat atas dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan, BNIS yang masih belia mampu menempati peringkat ketiga karena BNIS telah memiliki pengalaman selama 10 tahun menjadi UUS sejak tahun 2000 sebelum resmi menjadi BUS pada tahun 2010.

Kemudian, bila diamati secara keseluruhan BUS di Indonesia terus berupaya memperbaiki pengungkapan kegiatan CSR kepada *stakeholder*. Hal tersebut terlihat dari peningkatan total item yang diungkapkan masing-masing bank setiap tahun mengalami perbaikan. Jika dipersentasikan kenaikan pengungkapan dari tahun 2010 - 2012 ada dalam kisaran 9% - 9,8%. Secara keseluruhan bank umum syariah selama tiga tahun mengungkapkan tanggung jawab sosialnya sebesar 55%.

Sedangkan observasi pada masing-masing BUS, menunjukkan kondisi pengungkapan yang bervariasi. Pada tabel 2 di atas terlihat 2 BUS konsisten dalam mengungkapkan CSR-nya yaitu BSM dan BNIS dengan nilai masing-masing 40 (80%) dan 35 (70%) setiap tahunnya. Sedangkan 8 BUS lainnya walaupun tidak konsisten, namun mengalami perubahan positif setiap tahun. Kedua BUS yang konsisten mengungkapkan CSR tersebut adalah BUS yang telah lama berdiri. Akan tetapi kondisi ini tidak berlaku bagi BMI dan BMS. Seperti ditunjukkan oleh tabel di atas BMI mengalami kondisi pengungkapan yang berbeda dari tahun 2010-2012. Hal ini cukup mengecewakan karena sebagai bank syariah dengan jargon "*pertama murni syariah*".

Adapun BMS sebagai BUS ketiga yang berdiri setelah BMI dan BSM (lihat tabel 3), bila dilihat dari kematangan usia harusnya BMS juga mampu mengungkapkan tanggung jawab sosial lebih baik lagi seperti dua rekannya tersebut. Namun, fakta menunjukkan BMS berhasil dikejar oleh BCAS yang usianya terpaut jauh lebih muda. Rendahnya tingkat ISRD BMS dimotori oleh penurunan drastis pada tema tenaga kerja yang hanya mencapai 8% dari 13 item yang diuji pada tahun 2011, jauh berbeda dengan tahun 2010 dan 2012 yang mencapai 23%.

Pengamatan selanjutnya cukup menarik perhatian pada dua BUS yang tergolong sangat belia yaitu BRIS dan BJBS. Kedua BUS tersebut mengalami peningkatan pengungkapan CSR yang drastis dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Pada tahun 2012 BRIS mengalami peningkatan pengungkapan sebesar 28% dari skor sebelumnya yang hanya 25 item. Sedangkan BJBS, mengalami peningkatan 42,86% dari nilai sebelumnya yang hanya 21 item. Peningkatan BJBS ini merupakan pertumbuhan tertinggi dari seluruh BUS selama tahun 2012 terkait pengungkapan tanggung jawab sosial.

Hasil pengkajian terhadap fenomena ini ditemukan beberapa alasan yang memadai. Pada BRIS peningkatan ini dipicu oleh perbaikan

pengungkapan pada tema sosial. Pada kasus BJBS, perbaikan besar terjadi pada pengungkapan tema tata kelola perusahaan dan sosial. Hal ini ditengarai oleh pergantian direktur utama pada tahun 2012, dijabat A. Riawan Amin yang telah memiliki *track record* yang baik sebagai direktur BMI. Selain itu, peningkatan pengungkapan tanggung jawab sosial BJBS diduga adanya regulasi dari PEMPROV Jawa Barat. Seperti diketahui pada tahun yang sama Gubernur Jawa Barat mengesahkan keputusan No. 30 tahun 2011 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat. Sehingga, BJBS sebagai BUMD Jawa Barat juga harus tunduk terhadap regulasi tersebut.

Selain penjelasan di atas, penelitian ini juga menemukan sumber dana CSR bank umum syariah Indonesia masih didominasi oleh dana penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Sehingga penyalurannya masih terbatas pada ketiga konsep dana tersebut. Sedangkan konsep CSR lebih luas dibandingkan konsep penyaluran ZIS itu sendiri. Hanya beberapa bank syariah yang memisahkan pengungkapan dan penyaluran tersendiri antara CSR dan ZIS seperti BSM dan BNIS. Kemudian, BRIS dan BSB mengikuti langkah yang sama pada tahun 2012.

Sebagaimana ditunjukkan oleh tabel di atas, kondisi peringkat tertinggi ISRD bank umum syariah di Indonesia dimonopoli oleh bank-bank yang telah lama berdiri yaitu BSM, BNIS, dan BMI. Kesimpulan pengujian ini pada dasarnya sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Raharja (2011), Agrytasari (2012), Rizkiningsih (2012), dan Darus (2013). Namun, berbeda dengan penelitian terdahulu yang tidak mengambil sampel seluruh BUS, penelitian ini menemukan gambaran baru atas keseluruhan pengungkapan tanggung jawab sosial dari BUS yang ada di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil temuan, bahwa BUS yang tidak dijadikan sampel oleh peneliti terdahulu masih harus memperbaiki tingkat pengungkapan kegiatan CSR, seperti yang terjadi pada BPS dan BVS.

Kedua BUS tersebut memiliki tingkat ISRD terendah diantara seluruh BUS yang dijadikan sampel penelitian. Skor keduanya bahkan tidak mencapai 50% dari seluruh item yang harusnya diungkapkan. Hal ini dapat dimaklumi karena kedua BUS tersebut baru beroperasi pada tahun 2010 yang tergolong masih sangat belia. Selain masalah usia, bahkan BPS tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta dana zakat. Hal ini disebabkan karena kedua BUS ini langsung menyalurkan dana ZIS melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

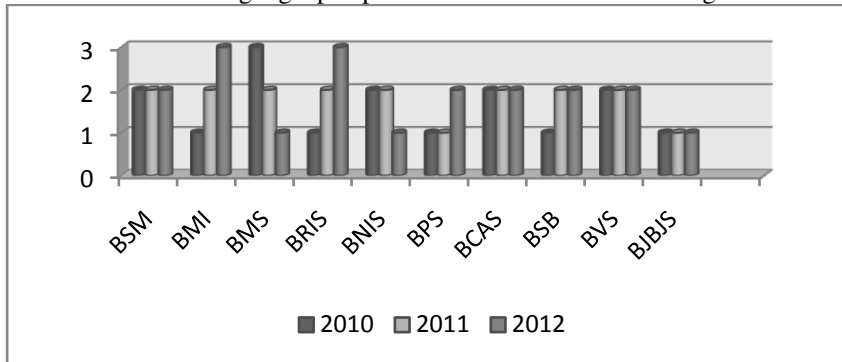
4.2 TINGKAT ISRD BANK UMUM SYARIAH BERDASARKAN INDIKATOR TEMA

4.2.1 Tingkat ISRD Bank Umum Syariah Berdasarkan Tema Investasi dan Keuangan

Tema investasi dan keuangan BUS Indonesia memperoleh persentase ISRD selama tiga tahun sebesar 35% dari 5 item yang diujikan. Persentase pengungkapan tertinggi sebesar 40% dimiliki oleh BSM, BMI, BMS, BRIS, BCAS, dan BVS. Sedangkan, persentase tiga terendah dimiliki BJBS (20%),

BPS (27%), BSB (33%). Secara grafik data di atas akan terlihat sebagai berikut.

Grafik 1. Pengungkapan pada Tema Investasi dan Keuangan



Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014

Berdasarkan pengamatan grafik di atas, BMI dan BRIS mengalami peningkatan drastis setiap tahun. Hal ini diindikasikan karena pada tahun 2010 BMI dan BRIS hanya mengungkapkan item zakat saja. Kemudian tahun berikutnya mengalami perbaikan dengan menambah item kegiatan yang mengandung bunga, gharar, dan kebijakan penangguhan piutang. Di sisi lain, BMS dan BNIS justru mengalami penurunan skor yang cukup tajam. Sedangkan, BSM, BCAS, dan BVS mengalami stagnansi yang sama setiap tahun dengan mengungkapkan dua item yaitu zakat dan kegiatan yang mengandung bunga.

Item pengungkapan dalam tema ini yang memiliki titik krusial, salah satunya adalah pengungkapan zakat meliputi jumlah dan penerimanya. Sangat disayangkan sebagai entitas syariah BSB, BJBS, dan BPS tidak membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakatnya. Namun, BJBS dan BPS masih lebih baik dibandingkan dengan BSB. Bank Jabar Banten Syariah tetap menyebutkan besar zakat dan penyalurannya meski tidak membuat laporan dana zakat dalam laporan keuangannya. Kondisi tersebut membuat ketiga BUS tersebut menempati peringkat tiga terendah dalam tema ini. Seharusnya, seluruh bank syariah walaupun tidak menyalurkan zakat secara langsung, tetap mengungkapkannya dalam laporan keuangan karena itu lah salah satu item pengungkapan yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional.

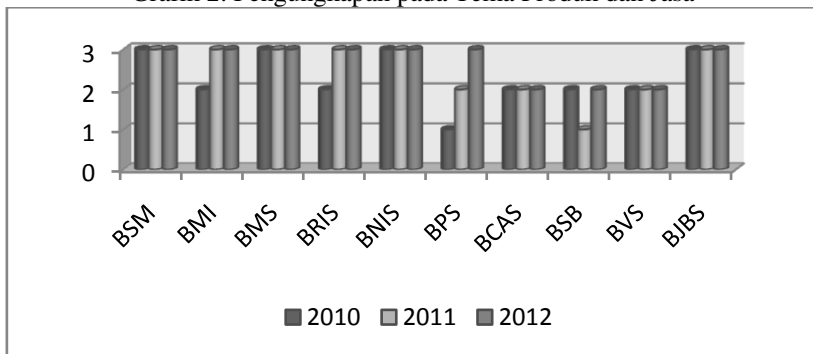
Hal menarik lain yang ditemukan dalam tema ini yaitu item pengungkapan kegiatan yang mengandung bunga. Kendati item kegiatan yang mengandung bunga (pendapatan atau beban bunga) diungkapkan BSB, BPS, dan BCAS. Namun ketiga bank tersebut, menyajikannya ke dalam laporan laba rugi dan diakui sebagai pendapatan operasional. Berdasarkan PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah, pendapatan bunga seharusnya disajikan terpisah dalam laporan sumber dan dana kebijakan sebagai dana non-halal. Temuan ini, mengindikasikan adanya pelanggaran

salah satu prinsip transaksi syariah yang dimuat dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yaitu keadilan (*'adalah*) karena adanya riba yang diakui sebagai pendapatan.

4.2.2 Tingkat ISRD Bank Umum Syariah Berdasarkan Tema Produk dan Jasa

Tema produk dan jasa memperoleh hasil yang terbilang memuaskan dari 3 item yang diujikan rata-rata pengungkapan seluruh BUS mencapai 83% selama tiga tahun. Persentase pengungkapan tertinggi mencapai nilai sempurna 100% dan nilai terendah 56%. Berikut grafik yang menggambarkan tingkat ISRD dengan tema produk dan jasa di setiap BUS Indonesia.

Grafik 2. Pengungkapan pada Tema Produk dan Jasa



Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014

Berdasarkan grafik di atas, nilai sempurna 100% berhasil dimiliki BSM, BMS, BNIS, dan BJBS. Sedangkan, BMI dan BRIS mengalami kondisi yang sama, dengan persentase 89%. BMI pada tahun 2010 tidak mendapatkan nilai sempurna karena tidak memenuhi item definisi produk. *Trend* positif dialami pula oleh BPS dengan perbaikan pengungkapan hingga mencapai skor sempurna pada tahun 2012. Akhir tahun 2010 BPS hanya mengungkapkan item kehalalan produk. Tahun berikutnya, BPS melengkapi skor dengan item definisi produk. Hingga pada tahun 2012 seluruh item berhasil diungkapkan. Bertolak belakang dengan yang dialami BSB, terjadi penurunan skor pada tahun 2011 dikarenakan BSB tidak mengungkapkan persetujuan DPS atas kehalalan produk.

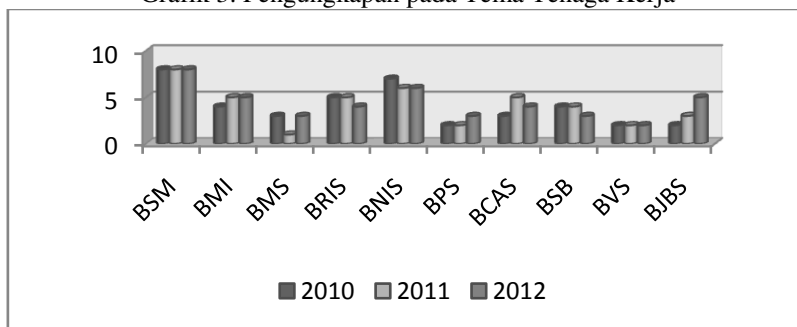
Peran DPS dalam tema pengungkapan ini sangat penting, terutama dalam hal pengungkapan kehalalan produk. Dalam PBI No. 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah disebutkan bahwa, sudah menjadi tanggung jawab seorang DPS memastikan seluruh produk yang dikeluarkan bank syariah terjamin kepatuhan syariahnya. Praktik di lapangan saat ini menunjukkan, opini DPS atas kehalalan produk bank syariah tidak memiliki standar baku seperti halnya opini auditor eksternal dalam menyatakan kewajaran laporan keuangan yang disajikan (Rahman, 2008, hlm. 5). Padahal, dalam banyak kasus, otorisasi DPS dapat disetarakan dengan auditor

eksternal (Karim, 1995, hlm. 35). Kondisi tersebut, mengakibatkan sulit untuk membandingkan kepatuhan syariah antar BUS satu dengan yang lain. Hal ini dapat pula memunculkan interpretasi ganda diantara pengguna laporan keuangan dan pada akhirnya akan memengaruhi kualitas pengungkapan kepatuhan syariah bank itu sendiri.

4.2.3 Tingkat ISRD Bank Umum Syariah Berdasarkan Tema Ketenagakerjaan

Secara garis besar BUS belum banyak melakukan pengungkapan dalam tema ini. Skor persentase ISRD keseluruhan bank selama tiga tahun hanya memperoleh 32% dari 13 item yang diujikan. Kenaikan pada tahun 2011 sebesar 3% dari tahun sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2012 kenaikan pengungkapan sebesar 5%. Persentase pengungkapan tertinggi ada pada angka 62% dan terendah 15%. Secara terperinci data pengungkapan BUS dalam tema tenaga kerja dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

Grafik 3. Pengungkapan pada Tema Tenaga Kerja



Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014

Grafik di atas menunjukkan posisi teratas berhasil diraih oleh BSM dengan persentase pengungkapan 62%. Pencapaian BSM jauh di atas rata-rata pengungkapan bank lain yang hanya 32%. Secara konsisten BSM mampu mengungkapkan 8 item setiap tahun dari 13 item. Hal ini dikarenakan dalam laporan tahunan hanya BSM yang menyampaikan tanggung jawab kepada karyawannya sebagai bagian dari laporan CSR selama tiga tahun. Hasilnya, BSM unggul dalam pengungkapan item kesehatan dan keselamatan kerja dibandingkan dengan kesembilan BUS lainnya.

Adapun posisi terakhir dengan persentase 15% jatuh pada BVS. Bank Victoria Syariah hanya mengungkapkan item pelatihan dan pendidikan serta lingkungan kerja. Penyebab yang melatarbelakangi fenomena tersebut adalah jumlah karyawan BVS hanya 414 orang hingga tahun 2012, terpaut jauh bila dibandingkan dengan BSM yang memiliki karyawan 9.331 orang. Menurut Cowen et. al (1987) dalam Sembiring (2005), menyatakan bahwa secara teoritis perusahaan dengan jumlah kontrak kerja yang lebih banyak, akan meningkatkan tekanan kepada pihak manajemen untuk memperhatikan kepentingan tenaga kerja karena legitimasi yang dibutuhkannya juga semakin

luas. Program yang berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja tentunya merupakan bagian dari tanggung jawab sosial. Dengan meningkatnya perhatian atas kesejahteraan tenaga kerja, akan meningkatkan pula pengungkapannya dalam laporan tahunan.

Namun, teori tersebut tidak berlaku bagi BMI dan BMS. Kondisi pengungkapan BMI justru lebih rendah dibandingkan dengan BNIS yang secara usia dan jumlah tenaga kerjanya lebih kecil. BNIS berhasil menempati peringkat kedua setelah BSM dengan persentase 49%. Sedangkan BMI hanya memperoleh persentase 36% sama dengan BRIS yang secara *size* karyawan juga lebih kecil darinya. Tidak hanya BMI, BMS pun mengalami hal yang serupa dengan jumlah pegawai yang lebih besar dari BMI hanya memperoleh persentase pengungkapan 18%. Penurunan pengungkapan BMS menurun tajam pada tahun 2011 karena hanya mengungkapkan 1 dari 13 item yaitu pendidikan dan pelatihan kerja saja. Perbandingan jumlah karyawan dan persentase ISRD yang dimiliki BMI, BNIS, BRIS, serta BMS per 2012 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Perbandingan BMI, BNIS, BRIS, dan BMS dari Jumlah Karyawan dan Persentase ISRD

No	Nama Bank	Jumlah Karyawan	Persentase ISRD
1	BMI	4.933 orang	36%
2	BNIS	2.409 orang	49%
3	BRIS	4.675 orang	36%
4	BMS	5.416 orang	18%

Sumber : Laporan Tahunan 2012 BMI, BNIS, BRIS, dan BMS diolah, 2014

Sedangkan, item-item yang tidak terungkapkan mayoritas adalah item pengungkapan Islami seperti pelaksanaan ibadah yang bersamaan, karyawan muslim dapat menjalankan ibadah shalat dengan nyaman, dan tempat ibadah yang memadai. Hanya BSM, BRIS, dan BNIS yang mengungkapkan pelaksanaan ibadah secara berjama'ah. BSM memiliki kegiatan *Forum Doa Pagi* (Bank Syariah Mandiri, 2012, hlm. 258) Sedangkan, BNIS dan BRIS hanya menyebutkan kegiatan doa dan berjama'ah dalam budaya organisasinya, tidak ada pengungkapan terperinci mengenai praktik pelaksanaan ibadah tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa konsep CSR dalam Islam tidak lepas dari dua dimensi yaitu *Hablumminallah* dan *Hablumminannas*. Melihat kondisi tersebut bank syariah saat ini, dapat dikatakan kurang memperhatikan pengungkapan yang menggambarkan hubungannya dengan Allah SWT sebagai *stakeholder* tertinggi (*Hablumminallah*). Hal itu dilihat dari aspek pengungkapan mengenai penanaman budaya spiritual dalam operasional bank syariah belum terungkapkan. Pentingnya aplikasi nilai-nilai Islam dalam budaya kerja untuk mengembangkan sumber daya insani bank syariah tidak hanya memiliki keahlian dari sisi perbankan, tetapi juga memiliki akhlak mulia sebagai cerminan lembaga keuangan yang menggunakan nama Islam sebagai identitasnya.

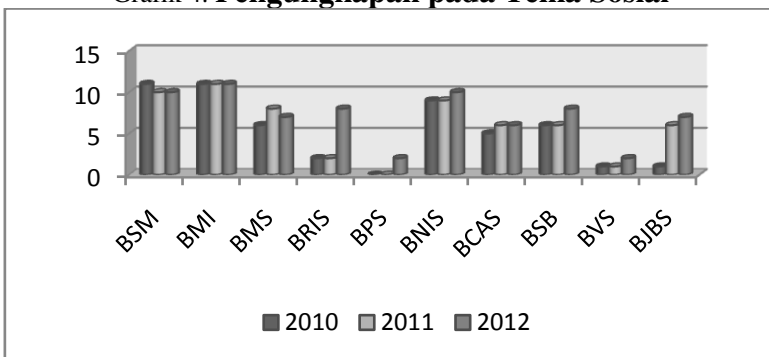
4.2.4 Tingkat ISRD Bank Umum Syariah Berdasarkan Tema Sosial

Secara garis besar, seluruh BUS Indonesia memiliki fokus cukup tinggi dalam mengungkapkan tema ini, karena berkaitan erat dengan kegiatan CSR yang sesuai dengan *core business* jasa perbankan. Terbukti dengan persentase ISRD seluruh bank selama tiga tahun menembus angka 55%. Terjadi peningkatan pengungkapan seluruh bank pada tahun 2012 sebesar 20,34% dari tahun sebelumnya. Persentase ISRD tertinggi mencapai 100% dan terendah hanya 6%. Hal tersebut menandakan adanya rentang nilai yang sangat jauh dalam tema sosial ini.

Berdasarkan data yang terhimpun, ditemukan adanya persaingan yang ketat antara BMI dengan BSM sebagai bank syariah senior di Indonesia. BMI berhasil memperoleh persentase pengungkapan sempurna 100%. Sedangkan BSM memperoleh 94%, tertaut 6% dengan BMI. Bank Muamalat Indonesia lebih unggul dalam tema ini, karena lembaga pengelola zakat dan CSR Bank Muamalat Indonesia yaitu BMM lebih berpengalaman dibandingkan dengan LAZNAS BSM. BMM didirikan sejak tahun 2000 sedangkan LAZNAS BSM baru didirikan sepuluh tahun kemudian. Secara variasi program penyaluran tentunya lebih baik Baitulmal Muamalat.

Kemudian, perolehan persentase terendah dalam tema sosial adalah BSP sebesar 6%. Ketimpangan ini terjadi karena pada tahun 2010 dan 2011 BSP sama sekali tidak mengungkapkan kegiatan CSR dalam laporan tahunan. Hal ini berkaitan erat pula dengan umurnya yang baru genap 2 tahun beroperasi. Selanjutnya, posisi dua terendah dimiliki oleh Bank Viktoria Syariah. Persentase ISRD Bank Viktoria Syariah hanya mencapai 12%, dua kali lipat lebih tinggi dari BSP. Rendahnya persentase ISRD Bank Viktoria Syariah dikarenakan, selama tiga tahun BVS hanya mengungkapkan besarnya dana *qard hasan* dari 13 item yang harusnya diungkapkan. Berikut ini grafik yang mengilustrasikan data-data tersebut.

Grafik 4. Pengungkapan pada Tema Sosial



Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014

Grafik diatas menggambarkan dinamika pengungkapan CSR bank syariah dalam tema sosial. Berdasarkan pengamatan dari grafik tersebut, terdapat dua bank yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan

dengan bank lainnya yaitu BRIS dan BJBS. Bahkan kedua bank tersebut mampu menandingi BUS ketiga yang didirikan di Indonesia yaitu BMS.

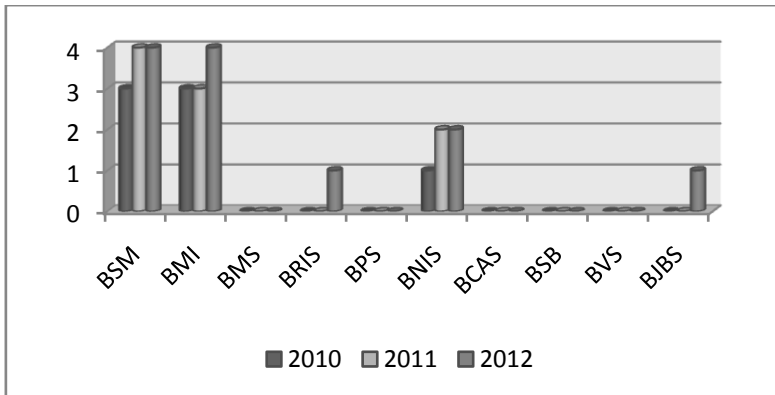
Item pengungkapan dalam tema ini yang tidak terpenuhi oleh seluruh bank adalah pengembangan pemuda dan pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah. Item pengembangan pemuda hanya diungkapkan penuh oleh BMI. Sedangkan BSM, BNIS, dan BSB mengungkapkan item tersebut hanya dalam satu periode pelaporan saja. Adapun item pemberdayaan masyarakat miskin, hanya diungkapkan oleh bank-bank syariah besar saja seperti BSM, BMI, dan BNIS.

Kembali pada teori CSR yang sebelumnya telah disampaikan, bahwa di dalam memenuhi CSR perusahaan telah berkomitmen untuk turut berkontribusi membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Item pengungkapan pengembangan pemuda dan pemberdayaan masyarakat miskin merupakan salah satu cerminan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan tersebut. Namun, dengan tidak terungkapkannya dua item itu secara menyeluruh, maka bank syariah di Indonesia belum dikatakan memiliki kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini patutnya menjadi perhatian penting, karena kegiatan CSR yang memiliki manfaat berkelanjutan merupakan salah satu jembatan untuk mewujudkan *maqosid syariah* (tujuan syariah). Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga termasuk dalam amanat yang disebutkan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas.

4.2.5 Tingkat ISRD Bank Umum Syariah Berdasarkan Tema Lingkungan

Tingkat pengungkapan dalam tema lingkungan memang paling rendah dibandingkan dengan tema lain. Terbukti dengan persentase ISRD selama tiga tahun yang hanya mencapai 19%. Persentase ISRD tersebut diperoleh dari 5 BUS saja, karena selebihnya tidak turut berpartisipasi dalam tema ini. Total pengungkapan BUS secara berurutan sebesar 6, 10, dan 12 item. Persentase pengungkapan tertinggi mencapai 73% dan yang terendah sebesar 0%. Rentang nilai yang terjadi dalam tema ini, merupakan rentang terjauh dibandingkan dengan tema-tema sebelumnya. Secara grafik data di atas akan nampak sebagai berikut.

Grafik 5. Pengungkapan dalam Tema Lingkungan



Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014

Grafik di atas, menunjukkan selama tiga tahun BUS yang memiliki total pengungkapan tertinggi adalah BSM dengan nilai 3, 4, dan 4 item. Persentase ISRD Bank Syariah Mandiri pun sangat tinggi dibandingkan BUS lain yaitu 73%. Peringkat selanjutnya jatuh pada BMI (67%) dan BNIS (33%). Sedangkan BJBS dan BRIS memiliki skor ISRD yang sama sebesar 7%. Selebihnya, BUS lain bernilai 0 (nol).

BSM menjadi peringkat terbaik karena tingkat kepeduliannya yang cukup tinggi akan konservasi dan manajemen lingkungan. Pada tahun 2012 dalam laporan *Good Corporate Governance (GCG)*, BSM menyampaikan akan memberikan porsi tersendiri atas dana CSR untuk menuju BSM "Clean dan Go Green" mendukung negeri tercinta ini untuk mewujudkan "Green Banking" dalam wujud nyata (Bank Syariah Mandiri, 2012, 214). Moto BSM tersebut, terealisasi melalui MOU bersama Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil dengan memanfaatkan *Debt for Nature Swap (DNS)* di sektor lingkungan. Selain itu, BSM pun menjadikan analisis AMDAL sebagai pra syarat pencairan pembiayaan bagi nasabah *corporate*-nya (Bank Syariah Mandiri, 2012, hlm. 250).

Selain BSM, BMI dan BNIS juga memiliki perhatian khusus dalam melakukan konservasi lingkungan. Kedua bank tersebut menerapkan manajemen lingkungan dengan menggunakan teknologi digital dalam operasional bisnisnya untuk mengurangi penggunaan kertas. Selain itu, BMI juga melakukan sosialisasi pendidikan lingkungan melalui kampanye *Go-Green* selama tiga tahun. Sedangkan BJBS dan BRIS memulai langkah awal dengan melakukan kegiatan reboisasi pada tahun 2012.

Salah satu penyebab rendahnya pengungkapan atas tema lingkungan adalah industri perbankan dalam operasionalnya tidak bersentuhan langsung dengan alam berbeda dengan industri pertambangan, pangan, ataupun kimia. Saat ini CSR bank syariah lebih banyak dikonsentrasikan dalam kegiatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial-keagamaan, dan bantuan bencana alam. Program-program penyaluran dana CSR dalam hal ini terkait erat

dengan *core business* perbankan. (Wibisono, 2007, dalam Agrytasari, 2012, hlm. 78).

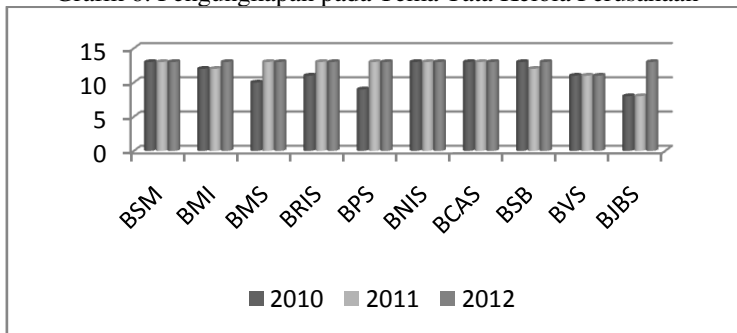
Akan tetapi, bukankah di dalam konsep *sustainable development*, dinyatakan sebuah logika yang tak terbantahkan bahwa keberlangsungan sebuah kehidupan tidak hanya bersandar pada kepentingan ekonomi dan sosial saja, tetapi juga kepentingan lingkungan hidup. Meskipun bank syariah dalam aktivitasnya tidak bersentuhan langsung lingkungan, seyogyanya tetap memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup dengan menyesuaikan program CSR mengenai pelestarian lingkungan sesuai *core business* perbankan.

Berdasarkan Pedoman CSR Bidang Lingkungan yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup, bank syariah dapat memilih beberapa bidang kegiatan CSR lingkungan yang sesuai bisnisnya seperti *eco office*, konservasi sumber daya alam, dan pendidikan lingkungan hidup sebagai alternatif penyaluran dana CSR seperti yang telah dilakukan lebih dahulu oleh bank-bank syariah di atas. Dengan pengembangan program CSR bank syariah dalam bidang lingkungan akan meningkatkan pula pengungkapannya dalam laporan tahunan.

4.2.6 Tingkat ISRD Bank Umum Syariah Berdasarkan Tema Tata Kelola Perusahaan

Tema ISRD ini memiliki tingkat pengungkapan tertinggi dibandingkan dengan 5 tema sebelumnya. Pencapaian pengungkapan tata kelola perusahaan dapat dinyatakan mendekati sempurna dengan persentase ISRD 93% selama tiga tahun. *Trend* positif juga terus terjadi walaupun tidak mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 7% dan tahun selanjutnya hanya 6%. Terdapat tiga bank dengan pengungkapan sempurna 100% dari 13 item pengujian yaitu BSM, BNIS, dan BCAS. Sedangkan, posisi terendah secara berurutan diperoleh BJBS, BVS, dan BSB. Kondisi pengungkapan masing-masing bank tersebut dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

Grafik 6. Pengungkapan pada Tema Tata Kelola Perusahaan



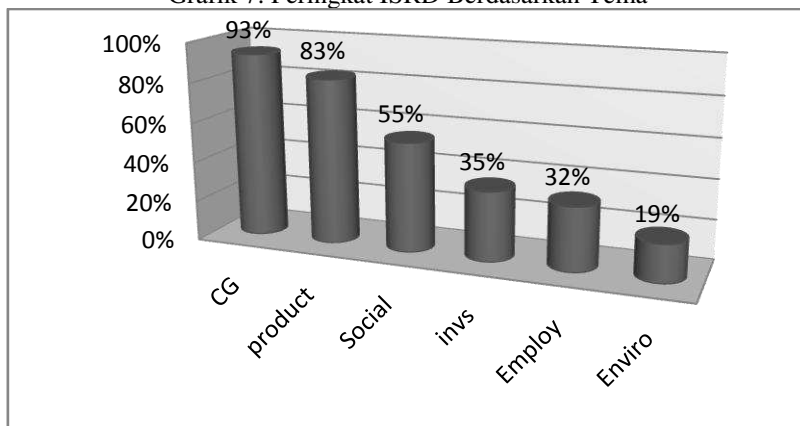
Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014

Berdasarkan pengamatan atas grafik diatas, BPS dan BJBS mengalami peningkatan yang cukup signifikan. BPS pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 44% dari nilai 9 menjadi 13 item. Bank Jabar Banten Syariah mengikuti langkah yang sama pada tahun selanjutnya. Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 62,5% dari nilai 8 menjadi 13 item. Namun, BVS tidak mengikuti jejak ke dua rekannya tersebut. Bank Victoria Syariah selama tiga tahun mengalami stagnansi dengan nilai pengungkapan 11 item saja.

Akan tetapi, secara garis besar, dapat dikatakan BUS di Indonesia telah melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Tingginya pengungkapan bank syariah atas tema ini karena adanya kekuatan regulasi yang mengikat dari Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank umum dan unit usaha syariah dalam PBI no. 11/33/PBI/2009. Oleh karena itu, setiap BUS di Indonesia harus patuh terhadap regulasi tersebut.

Penjelasan pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah berdasarkan 6 tema besar, menyimpulkan bahwa tema tata kelola perusahaan memperoleh tingkat tertinggi. Kemudian, disusul oleh tema produk dan jasa dengan selisih hanya 10%. Peringkat selanjutnya diraih oleh tema sosial sebesar 55%. Sedangkan, urutan tiga terendah berurutan diperoleh tema investasi dan keuangan (35%), ketenagakerjaan (32%), dan lingkungan (19%). Grafik di bawah ini menunjukkan perbedaan skor ISRD setiap tema tersebut.

Grafik 7. Peringkat ISRD Berdasarkan Tema



Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014

Grafik di atas menunjukkan tingkat ISRD terbesar berdasarkan tema yang paling banyak diungkapkan adalah tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan yang terendah ada pada tema lingkungan. Hasil peringkat ISRD berdasarkan tema tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Raharja (2011), Darus et. al (2013), dan Agrytasari (2012). Tingginya pengungkapan tema ini karena adanya regulasi yang mengikat dari Bank

Indonesia untuk mewajibkan setiap bank syariah mengungkapkan praktik *Good Corporate Governance (GCG)* dalam bentuk laporan dan melakukan *self assessment* atas hal tersebut. Sebagaimana yang telah terperinci disebutkan dalam PBNo. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS.

Sedangkan, tema terendah yang diungkapkan oleh BUS adalah tema lingkungan. Tidak hanya dalam penelitian ini, penelitian terdahulu seperti Agrytasari (2012) dan Fauziah (2013) juga menemukan tema lingkungan menjadi tema dengan pengungkapan terendah. Salah satu penyebab rendahnya pengungkapan tema lingkungan adalah industri perbankan dalam operasionalnya tidak bersentuhan langsung dengan alam berbeda dengan industri pertambangan, pangan, ataupun kimia. Program-program penyaluran dana CSR dalam hal ini terkait erat dengan *core business* perbankan.

Secara sederhana, solusi untuk meningkatkan ISRD bank syariah adalah dengan membuat regulasi terikat yang mengharuskan bank syariah mengungkapkan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan seperti halnya dalam tema tata kelola perusahaan. Dengan demikian, pengungkapan tanggung jawab sosial tidak menonjol di salah satu tema saja. Peran pemerintah dan Bank Indonesia menjadi penting di sini untuk membentuk kebijakan yang *pro* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah.

4.3 HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS PENELITIAN

Serangkaian uji normalitas dan asumsi klasik data yang dilakukan telah memenuhi syarat. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS vs. 16. Berdasarkan *output* analisis yang dihasilkan, akan dilakukan beberapa pengujian yang terdiri dari model regresi linear berganda ISRD, nilai R^2 , uji signifikan simultan (uji F), dan signifikan parsial (uji t). Sebagai langkah awal, berikut ini hasil regresi SPSS vs. 16 yang diperoleh dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Sifat Hubungan	Koefisien	t-statistik	p-value
Intercept		16.997	4.049	0.000
ME	+	0.908	2.115	0.045
OWN	-	-1.526	-0.375	0.711
IG	+	2.385	2.955	0.007
ROA	+	20.055	0.4	0.693
SIZE	+	0.312	5.101	0.000
F-value	16.339			
Sign. F (<i>p-value</i>)	0.000			
R	0.879			
R^2	0.773			

Adjusted R ²	0.726
-------------------------	-------

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014

Tabel di atas menggambarkan koefisien variabel independen terhadap variabel dependen yang dirangkai menjadi persamaan model regresi berganda sebagai berikut.

$$\text{ISRD} = 16,997 + 0,908 \text{ ME} - 1,526 \text{ OWN} + 2,385 \text{ IG} + 20,055 \text{ ROA} + 0,312 \text{ SIZE} + e$$

Keterangan :

ISRD = Islamic Social Reporting Disclosure

ME = Media Exposure

OWN = Kepemilikan Institusional Induk

IG = Islamic Governance Score

ROA = Profitabilitas

SIZE = Total Assets

Model regresi di atas menunjukkan variabel ME dan *IG-score* memiliki hubungan yang positif dengan ISRD. Artinya semakin tinggi nilai ME dan *IG-score* akan meningkatkan pula nilai ISRD bank syariah sesuai dengan kelipatan dari koefisien setiap variabel independen. Sementara itu, terdapat pula variabel independen yang memiliki hubungan negatif dengan ISRD yaitu OWN. Artinya jika nilai OWN semakin tinggi justru akan membuat tingkat ISRD semakin rendah. Hasil pengujian ini menolak dugaan awal OWN memiliki hubungan positif terhadap tingkat ISRD bank syariah. Sedangkan nilai R² yang diperoleh dalam persamaan regresi ini sebesar 77,3%. Artinya seluruh variabel independen yang digunakan dalam persamaan regresi ini memiliki 77,3% dalam menjelaskan luas ISRD bank syariah. Sedangkan sisanya 22,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pengujian secara simultan pun menunjukkan *P-value* di bawah tarafnya 0,05 yang artinya *ME*, *OWN*, *IG*, *ROA*, dan *SIZE* memang secara simultan signifikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat ISRD.

Namun, uji secara parsial dari setiap signifikansi masing-masing variabel independen memiliki hasil yang berbeda. Variabel *Media Exposure* memiliki *P-value* 0,045 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan H_{0a} ditolak, secara otomatis H_{1a} diterima. *Media Exposure* terbukti signifikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat ISRD. Senada dengan *Media Exposure*, *IG-score* juga memperoleh *P-value* yang diperoleh 0,007 < 0,05. Sehingga disimpulkan H_{0c} ditolak, secara otomatis H_{1c} diterima. *IG-score* terbukti signifikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat ISRD. Bertolak belakang dengan kepemilikan institusional induk, *P-value* yang diperoleh 0,711 > 0,05. Sehingga disimpulkan H_{0b} diterima, secara otomatis H_{1b} ditolak. *Kepemilikan Institusional Induk* tidak signifikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat ISRD.

4.4 PEMBAHASAN HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

4.4.1 Media Exposure Terhadap Tingkat Islamic Social Reporting Disclosure

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Media Exposure dalam penelitian ini diprosikan dengan frekuensi press release kegiatan CSR bank syariah dalam website resmi masing-masing bank. Berdasarkan hasil penelusuran, perolehan tertinggi Media Exposure bank syariah ada pada tahun 2011 dengan nilai 21 press release, jauh dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya 6 press release. Frekuensi Media Exposure tertinggi pada tahun 2011 tersebut jatuh pada BNIS dengan nilai 8 press release. Selain itu, bank yang dikatakan konsisten dalam mempublikasikan kegiatan CSR melalui media internet adalah BSB dengan frekuensi berurutan 2, 4, dan 4. Kemudian, hanya BPS dan BVS saja yang tidak memiliki Media Exposure dari 10 bank syariah yang ada. Secara umum, data tersebut mengindikasikan bahwa bank syariah saat ini mulai sadar akan pentingnya melakukan publikasi kegiatan CSR melalui media massa, selain annual report.

Jumlah Media Exposure bank syariah yang terus membaik berhasil memengaruhi tingkat ISRD bank syariah secara signifikan. Media Exposure berpengaruh signifikan dengan arah koefisien positif (0,908) terhadap tingkat ISRD. Signifikansi Media Exposure mencapai 0,045 di bawah taraf nyata 0,05. Jika bank syariah semakin banyak mempublikasikan kegiatan CSR dalam website, maka bank akan meningkatkan pula ISRD dalam laporan tahunan lebih detail dibandingkan dengan Media Exposure. Peningkatan ini terjadi karena semakin banyak corporate melakukan publikasi melalui media, akan membuat corporate tersebut menjadi objek perhatian dan pengawasan publik (Bansal, 2005, hlm. 197). Berdasarkan fenomena yang terjadi, bank syariah saat ini dapat dikatakan telah melakukan praktik ISRD secara full disclosure bagi pemangku kepentingan secara luas yaitu masyarakat dan pemegang sahamnya. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reverte (2009), Yao et., al. (2011), dan Kristi (2012). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya, variabel Media Exposure dikembangkan dengan proksi frekuensi press release.

Selain itu, penemuan ini berhasil mendukung teori stakeholder. Dimana ketika posisi stakeholder yang semakin kuat dengan kemudahan mengakses tanggung jawab sosial perusahaan maka kemampuan perusahaan tersebut untuk beradaptasi dengan keinginan stakeholder akan semakin tinggi pula. Perlu diketahui bersama, Media Exposure memegang peran penting dalam memengaruhi keputusan stakeholder untuk memberikan legitimasi, karena itu merupakan salah satu sumber informasi utama kegiatan CSR. (Simon, 1992, hlm. 273).

4.4.2 Kepemilikan Institusional Induk Terhadap Tingkat Islamic Social Reporting Disclosure

Kepemilikan institusional induk diperoleh melalui persentase kepemilikan saham bank induk masing-masing sampel penelitian. Rata-rata seluruh

sampel 99,99% dimiliki oleh bank induknya yang mayoritas bank konvensional. Hal ini terjadi karena BUS di Indonesia belum menjadi perusahaan *go public*, sehingga sahamnya tidak dimiliki secara umum. Berbeda dengan BMI yang memang berdiri sendiri sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Kepemilikan saham institusional induknya diperoleh dari persentase kepemilikan IDB sebagai pemegang saham terbesar.

Berdasarkan data tersebut, penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan institusional induk tidak berpengaruh terhadap tingkat ISRD bank syariah. Uji statistik membuktikan bahwa probabilitas (*p-value*) kepemilikan institusional induk lebih besar dari taraf nyata 0,05 yaitu 0,771. Hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Sebagai bukti tidak signifikannya kepemilikan institusional induk, BMI dengan persentase kepemilikan institusional induk sebesar 32,77%, menempati posisi ke dua setelah BSM dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan, bank yang dimiliki oleh induknya 99,99% mayoritas pengungkapannya kurang lebih hanya 50% seperti BMS, BRIS, BPS, BCAS, dan BVS. Tidak signifikannya kepemilikan institusional induk, diduga karena keseragaman kepemilikan bank syariah yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah dideskripsikan sebelumnya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu Nurkhin (2009) dan Rustiarini (2010) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Asumsi awal, struktur kepemilikan institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Novita Djakman, 2008, dalam Nurkhin, 2009, hlm. 69). Hal ini berarti, seharusnya kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun, fakta di lapangan menunjukkan jawaban yang bertolak belakang.

Nurkhin (2009) menyatakan pengaruh kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR dikarenakan perusahaan perbankan, asuransi, dana pensiun, dan *asset management* di Indonesia belum mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi, sehingga para investor institusi ini juga cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapkan CSR secara detail dalam laporan tahunan perusahaan.

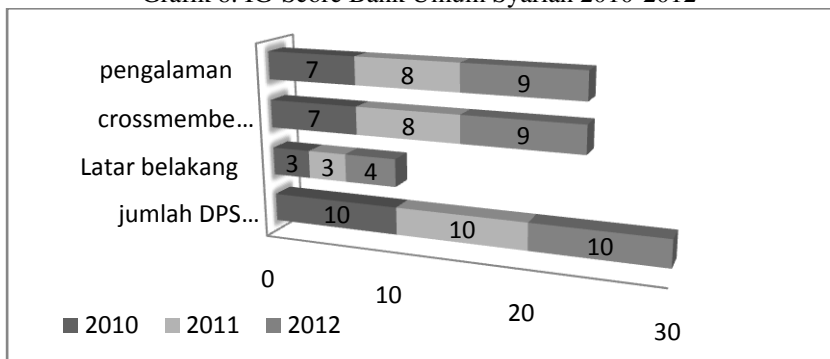
Penelitian ini tidak berhasil membuktikan teori legitimasi. Kendati, posisi bank induk sangat kuat, namun tidak memberikan tekanan untuk meningkatkan ISRD bank syariah. Hal ini dikarenakan ISRD bukan menjadi titik poin perhatian bank induk dalam memberikan legitimasi atas operasional usaha. Budaya korporasi bank konvensional dan syariah menjadi *gap* di antara keduanya. Menurut Yusanto dan Widjajakusuma (2000) yang dikutip oleh Badroen, et al (2006) perbedaan *corporate culture* antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada filosofi dan orientasi bisnis, bank syariah tidak hanya mementingkan pencapaian laba seperti halnya bank

konvensional. Bank syariah harus memperhatikan nilai keberkahan usaha dengan mengungkapkan item-item ISRD yang mencerminkan kepatuhannya terhadap syariah. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal, pengungkapan CSR sebuah entitas syariah merupakan bagian pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT sebagai *khalifah* yang ditugaskan-Nya untuk memelihara sumber daya di bumi ini. Sedangkan, bank konvensional tidak memiliki kepentingan akan hal itu. Sehingga wajar jika induk bank syariah tersebut tidak berperan penting dalam pengungkapan tanggung jawab sosial secara Islami.

4.4.3 Islamic Governance Score Terhadap Tingkat Islamic Social Reporting Disclosure

IG-score menjadi variabel Islami yang diproksikan dengan kualitas DPS berdasarkan empat kriteria yaitu *size*, latar belakang pendidikan, *cross membership*, dan reputasi karir. Berdasarkan hasil penelusuran, gambaran *IG-score* bank syariah saat ini selama tiga tahun terus mengalami perbaikan, seperti yang terlihat dalam grafik di bawah ini.

Grafik 8. IG-Score Bank Umum Syariah 2010-2012



Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014

Grafik diatas menunjukkan kualitas DPS bank umum syariah saat ini bervariasi dilihat dari masing-masing kriteria. Pengamatan atas grafik tersebut menyimpulkan seluruh bank syariah telah memenuhi kriteria *size* DPS. Setiap bank memiliki jumlah DPS antara 2 atau 3 orang, tidak pula lebih 50% dari direksi, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Namun dari keempat kriteria *IG-score*, latar belakang pendidikan DPS rata-rata tidak terpenuhi seperti yang terlihat dalam grafik di atas. DPS yang bertugas di bank syariah mayoritas berlatar belakang pendidikan ilmu agama dan muamalah saja, tidak ada kombinasi anggota yang memiliki latar belakang keuangan ataupun ekonomi.

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini menduga bahwa *Islamic Governance Score* yang diproksikan dengan kualitas DPS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ISRD bank syariah. Variabel *IG-score* berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai koefisien positif sebesar

2,385 dengan tingkat signifikansi di bawah taraf nyata 0,05 yaitu 0,007. Maka, dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hal ini didukung oleh tingkat *IG-score* bank syariah yang juga terus mengalami *trend* positif.

Hasil penelitian ini berhasil mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa keberadaan DPS (dengan analogi Dewan Komisaris) dapat memberikan pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika keberadaan Dewan Komisaris dapat memberikan tekanan terhadap pengungkapan CSR, maka DPS pun dapat juga memengaruhi pihak manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial karena kedudukan keduanya sejajar dalam struktur organisasi. Perbedaannya, Dewan Komisaris menekan pengungkapan CSR untuk kepentingan *shareholder*, sedangkan DPS mewakili pihak *stakeholder* yang lebih luas terkait dengan *sharia assurance* atas seluruh kegiatan operasional bank syariah (termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial).

Penelitian ini pun sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Farook dan Lanis (2007), Sudaryati dan Eskadewi (2012), dan Chariri (2012) dengan kesimpulan bahwa *IG-score* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial entitas syariah. Berdasarkan PBI No. 11/33/2009, DPS merupakan salah satu mekanisme *Good Corporate Governance* bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional. Dalam pasal 47 tugas dan wewenang DPS secara umum adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Kemudian dalam ayat 2 pasal tersebut, menjelaskan salah satu tugas dan wewenang DPS pada ayat 1 ialah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional (dalam hal ini praktik pengungkapan tanggung jawab sosial) dan produk yang dikeluarkan Bank.

Selain dari kekuatan regulasi yang mendukung tingkat signifikan *IG-score*, faktor pengalaman DPS juga menentukan pengaruh terhadap ISRD bank syariah. Penelitian ini menemukan bahwa DPS bank syariah saat ini terbilang telah memiliki pengalaman yang memadai baik di bidang muamalah maupun keuangan. (lihat grafik 4.13) Para pakar tersebut telah memiliki *track record* beberapa kali menjadi DPS baik di bank maupun entitas syariah lainnya. Beberapa DPS bank syariah juga aktif dalam organisasi Islam besar di Indonesia, seperti KH. Ma'rif Amin yang menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan Prof. DR. H. Didin Hadhuddin, M.Sc. yang saat ini menjabat sebagai ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Selanjutnya, praktik *cross membership* DPS yang terjadi antar bank juga mendukung signifikansi *IG-score*. Menurut Farook dan Lanis (2007), DPS dengan status *cross membership* memiliki pengetahuan untuk membandingkan sistem pengawasan antar perusahaan. Selain itu, keputusan dewan dari perusahaan lain menjadi pertimbangan bagi dewan perusahaan dimana ia bekerja pula. *Cross membership* dapat pula meningkatkan pengalaman dan pengetahuan DPS mengenai pengungkapan tanggung jawab

dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil observasi 80% DPS bank syariah saat ini memiliki status *cross membership* baik antar bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lain. (lihat grafik 4.13) Hanya 20% saja yang tidak mengungkapkan rangkap jabatan DPS-nya, salah satunya adalah BVS.

4.4.4 Variabel Kontrol Profitabilitas Terhadap Tingkat *Islamic Social Reporting Disclosure*

Profitabilitas yang diprosikan dengan *Return On Assets* (ROA) dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel kontrol karena secara empiris banyak penelitian terdahulu yang telah membuktikan signifikansinya terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun, diluar dugaan hasil uji hipotesis penelitian ini menemukan hal yang berbeda. Tingkat signifikan yang diperoleh atas uji statistik ROA adalah 0,693, jauh di atas taraf nyata 0,05. Sehingga asumsi awal bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ISRD ditolak. Hal ini serupa dengan penemuan Mosaid dan Boutti (2012), Liew, et al (2012), KS Pian (2010), Angraini (2006), Karina (2013), Purnasiwi (2011), dan Chuzairi (2013) yang tidak menemukan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Hasibuan (2001) dalam Agrytasari (2012) menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi, salah satu argumen dalam hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial adalah ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi, perusahaan tidak perlu melaporkan hal-hal yang mengganggu informasi tentang suksesnya keuangan mereka. Sebaliknya, saat profitabilitas mereka rendah, perusahaan akan menampilkan pencapaian lain selain kinerja keuangan salah satunya pengungkapan CSR. Hal itu dilakukan guna memperbaiki legitimasi yang diberikan dan menarik perhatian investor.

Menurut Lindblom (1994) dalam Ikbal (2012), hal tersebut merupakan upaya untuk mengurangi *legitimacy gap* dengan mengalihkan (memanipulasi) perhatian dari masalah yang menjadi perhatian (mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan-kegagalan). Sehingga, perusahaan dengan profitabilitas positif cenderung tidak terlalu mementingkan pengungkapan tanggung jawab sosialnya karena ia telah memiliki legitimasi yang memadai.

Hal lain yang menyebabkan tidak berpengaruhnya profitabilitas terhadap ISRD yaitu tingkat ROA bank syariah yang terbilang rendah. Hal itu diindikasikan dari kecilnya *market share* bank syariah yang hanya 4,58%. Rata-rata profitabilitas bank syariah selama tiga tahun pun hanya mencapai 1,4% dengan nilai tertinggi 6,93% dan terendah -2,53%. Kendati demikian, trend profitabilitas yang dialami bank syariah tetap positif.

5. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat ISRD bank syariah secara umum terus mengalami trend positif. Peningkatan pengungkapan selama tiga tahun ada pada kisaran 9% - 9,8%. Sedangkan, persentase ISRD seluruh BUS sebesar 55%. Pengungkapan dengan skor ISRD tinggi dimonopoli oleh bank yang memiliki usia matang. Namun, diperlukannya penyempurnaan pengungkapan pada tema-tema indeks ISR tertentu seperti lingkungan dan ketenagakerjaan. Tema tertinggi yang diungkapkan bank syariah adalah tata kelola perusahaan (93%), disusul dengan produk dan jasa (83%). Kemudian, tema lain diungkapkan secara berurutan tema sosial (55%), investasi dan keuangan (35%), tenaga kerja (32%), dan lingkungan (19%). Pengungkapan akan item-item Islami juga perlu mendapat perhatian khusus bagi manajemen. Selain itu, salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah pengakuan bunga dalam unsur laporan laba-rugi beberapa bank syariah. Hal ini perlu ditindaklanjuti bersama mengingat bank syariah merupakan entitas yang seharusnya memahami benar tentang keharaman riba dalam Islam. Ini merupakan salah satu konsentrasi dari perbaikan pengungkapan dan penyajian laporan keuangan bank syariah.

Penelitian ini menemukan bahwa secara simultan faktor-faktor *nonfinancial* yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat ISRD sebesar 16,339%. Variabel independen dalam penelitian ini pun mampu menjelaskan tingkat ISRD sebesar 77,3%. Adapun berdasarkan pengujian secara parsial, penelitian ini tidak berhasil mendukung teori legitimasi dan *stakeholder* dalam pengaruh kepemilikan institusional induk terhadap tingkat ISRD bank syariah. *Media Exposure* pengaruh signifikan terhadap ISRD, didukung dengan teori *stakeholder*. Ada pun, *IG-score* juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap ISRD. Hal ini berkaitan dengan kualitas DPS pada bank syariah yang berperan penting dalam memberikan legitimasi dan pengawasan kepatuhan syariah atas operasional bank (dalam hal ini pengungkapan CSR secara Islami).

Faktor-faktor non financial yang berhasil ditemukan signifikan dalam penelitian ini dapat dijadikan tools bank syariah dalam rangka meningkatkan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosialnya kepada stakeholder, terutama kepada Allah SWT sebagai stakeholder tertinggi di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Tentunya perbaikan tingkat pengungkapan juga perlu mendapatkan dukungan regulasi baik dari Bank Indonesia maupun OJK kelak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal pengukuran media exposure, yang hanya menjadikan press realease kegiatan CSR bank syariah dalam website resminya saja. Selain itu, sampel penelitian ini merupakan sampel minimum dalam pengujian regresi ganda. Penelitian selanjutnya dapat memperluas pengukuran media exposure dengan menambahkan press realease dalam media cetak selain media online. Sampel penelitian pun sebaiknya diperluas seiring dengan bertambahnya bank umum syariah di Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agrytasari, Siska. (2012). Faktor-Faktor yang Berkolerasi Terhadap Pengungkapan Taggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate social responsibility) (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010). Skripsi tidak dipublikasikan, Depok: STEI SEBI.
- Ahmed, I. E. (2012). The contents of social disclosure: A survey of the UAE Islamic Banks 'reports. *Khartoum University Journal of Management Studies*, 5(1).
- Alawi, Nahg Abdul Majid dan Azhar Abdul Rahman. (2011). Corporate Social Responsibility Disclosure in Response to CSR Award with The Moderating Effect of Family Group Affiliation in Yemen. On Eproceedings For 2011 International Research Conference and Colloquium, Contemporary Research Issues and Challenges in Emerging Economies, Malaysia.
- Al-Qur'anul Karim dan Terjemah. Departemen Agama RI. Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-Art.
- AL-Shubiri, F. N., Al-abadallat, A. Z., & Orabi, M. M. A. (2012). Financial and non financial determinants of corporate social responsibility. *Asian Economic and Financial Review*, 2(8), 1001-1012, <http://aessweb.com/journal-detail.php?id=5002>.
- Badroen, Faisal et. al. (2007). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Bank Indonesia. (2013). Islamic Banking Statistic July 2013. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Bansal, P. (2005). Evolving sustainably: A longitudinal study of corporate sustainable development. *Strategic management journal*, 26(3), 197-218.
- Chariri, Charles. (2012). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus pada Bank Syariah di Asia). On Diponegoro Journal of Accounting, 1-15.
- Chuzairi, Ahmad. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2012. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Darus, Faizah, et al. (2013). Social Responsibility Reporting of Islamic Banks: Evidence from Indonesia. Accounting Research Institute (ARI) and Faculty of Accountancy Universiti Teknologi Mara Shah Alam, Malaysia.

- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-shari'ah, Masalahah and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences (AJISS)*, 24(1), 25-45.
- Farook, Sayd dan Roman Lanis. (2007). Banking on Islam? Determinant of Corporate Social Responsibility Disclosure. Paper On 6th International Conference on Islamic Economic and Finance Vol. 1. Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Fauziah, K. (2013). Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1), 12-20.
- Haniffa, Ros. (2002, July). Social Reporting Disclosure: an Islamic Perspective. On Indonesian Management dan Accounting Research Vol. 1 No. 2 July 2002, 128-146.
- Hardiyanti, Sari. (2012). Analisis Hubungan Shari'a Governance Structures Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate social responsibility Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Skripsi tidak dipublikasi. Depok: Universitas Indonesia.
- Ikbal, M. (2012). Hubungan Karakter Perusahaan dan Profitabilitas Dengan Praktek Pengungkapan Sosial Dan Lingkungan: (Suatu Telaah Empiris dan Teoritis). *Jurnal Kinerja*, 9(2), 25-36.
- Abdel Karim, R. A. (1995). The nature and rationale of a conceptual framework for financial reporting by Islamic banks. *Accounting and Business Research*, 25(100), 285-300.
- Karina, Lovink Angel Dwi. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan CSR (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011). Skripsi Tidak Dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 30 Tahun 2011 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat.
- Kristi, Agatha Aprinda. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Publik di Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya.
- YEE, L. S. (2012). *DETERMINANTS OF CSR DISCLOSURE: A STUDY ON MALAYSIA COMPANIES IN KLSE MAIN MARKET* (Doctoral dissertation, UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN).
- Lucyanda, J., & Siagian, L. G. (2012). The Influence of Company Characteristics Toward Corporate Social Responsibility Disclosure.. Paper on The 2012 International Conference on Business and Management, Phuket – Thailand.

- Maali, Bassam et al. (2003). Social Reporting by Islamic Banks. On Discussion Papers in Accounting and Finance University of Southampton Number AF03-13 ISSN 1356-3548, 1-39.
- Mas'ud, Muhammad Praditya. (2013). Analisis Pengungkapan Nilai-Nilai Islam dalam Laporan Tahunan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(1), 5-28.
- Mosaid, Fadma El dan Rachid Boutti. (2012). Relationship Between Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Islamic Banking. *On Research Journal of Finance and Accounting* ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol 3, No 10, 93-103, www.iiste.org.
- Nurkhin, Ahmad. (2010, Maret). Corporate Governance dan Profitabilitas, Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan CSR Sosial Perusahaan. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(1), 46-55.
- Othman, R., & Thani, A. M. (2010). Islamic social reporting of listed companies in Malaysia. *The International Business & Economics Research Journal*, 9(4), 135-144.
- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of Islamic social reporting among top Shariah-approved companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, 12(12), 4-20.
- Pedoman CSR Bidang Lingkungan. (2011). Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Peraturan Bank Indonesia no. 11/3/2009 Tentang Bank Umum Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia no. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Purnasiwi, Jayanti. (2011). Analisis Pengaruh Size, Profitabilitas dan leverage Terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi tidak dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Raharja, Surya. (2011, July). An Examination of Social Disclosures by Islamic Banks in Indonesia. Paper Research on IIUM International Accounting Conference V (Intac V), Pan Pacific Klia, Malaysia.
- Rahman, Abdul Rahim Abdul. (2008, November). Shari'ah Audit for Islamic Financial Services: The Needs and Challenges. Paper On ISRA Islamic Finance Seminar (IIFS).

- Reverte, C. (2009). Determinants of corporate social responsibility disclosure ratings by Spanish listed firms. *Journal of Business Ethics*, 88(2), 351-366.
- Rizkiningsih, Priyesta. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR): Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Negara-Negara Gulf Corporation Council. , Skripsi tidak dipublikasi. Depok: Universitas Indonesia.
- Rustiarini, Ni Wayan. (2010). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Denpasar: Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Sembiring, E. R. (2005). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi 8, 379-395.
- Simon, F. L. (1992). Marketing green products in the triad. *Columbia Journal of World Business*, 27(3-4), 268-285.
- Sofyani, H., Ulum, I., Syam, D., & Wahjuni, S. (2012). Islamic Social Reporting Index Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 4(1), 36-46.
- Sudaryati, Dwidan Yunita Eskadewi. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. 11(1), 14-28.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Widiawati, S., & Raharja, S. (2012). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ISLAMIC SOCIAL REPORTING PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAPAT PADA DAFTAR EFEK SYARIAH TAHUN 2009-2011* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Yao, S., Wang, J., & Song, L. (2011). Determinants of social responsibility disclosure by Chinese firms. *The University of Nottingham-China Policy Institute. Discussion Paper*, 72.
- Yuliani, Sinta. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2006-2010. Skripsi tidak dipublikasikan. Depok: Universitas Indonesia.
- Zubairu, U. M., Sakariyau, O. B., & Dauda, C. K. (2012). Evaluation of social reporting practices of Islamic banks in Saudi Arabia. *EJBO*:

Electronic Journal of Business Ethics and Organizational Studies,
17(1), 42-50.